

***The Path of Social Development:
The Church's Mission in Poso City for the Restoration of Poso
After a Quarter-Century Post-Conflict***

**Jalur Pembangunan Sosial:
Misi Gereja di Poso Kota Bersaudara Dalam Pemulihan Poso
Setelah Seperempat Abad Pascakonflik**

Pieter G.O. Sunkudon

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Palu, Indonesia

Email: pietersunkudon@gmail.com

Submitted: 21 June 2024 Revision: 26 March 2025 Accepted: 30 April 2025



Journal of Religious and Socio-Cultural by <https://jurnal.widyaagape.ac.id/index.php/jrsc/>
is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

Abstract

This research aims to provide an in-depth and holistic understanding of the role of the Christian Church in post-conflict social development in Poso, as well as detailing an evaluation of the successes or challenges faced by the Christian church in achieving its social development mission after 25 years after conflict. The results of this research have significant implications for the role and responsibilities of the Church in the context of social development missions in the Poso and perhaps also in other conflict contexts. The information and findings obtained from this research can be the basis for formulating more effective and sustainable strategies in supporting social development purposes in the region. It is hoped that the implications of the research results can provide input for churches and governments in designing more effective, sustainable social development programs in the future. This article contributes by providing a comprehensive understanding of the role, successes, and challenges of the Christian Church in post-conflict social development in Poso, while offering practical implications for churches and governments in designing more effective and sustainable recovery strategies.

Keywords: Church, Social Development Mission, Poso, Post Conflict, Post 25 Years Conflict, Trauma, Spirituality, Reconciliation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang peran Gereja Kristen dalam pembangunan sosial pasca konflik di Poso, serta merinci evaluasi terhadap keberhasilan atau tantangan yang dihadapi oleh gereja Kristen dalam mencapai misi pembangunan sosial setelah 25 tahun pasca konflik. Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap peran dan tanggung jawab Gereja dalam konteks misi pembangunan sosial di Poso dan mungkin juga di daerah-daerah konflik lainnya. Informasi dan temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung tujuan pembangunan sosial di wilayah tersebut. Diharapkan implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi gereja dan pemerintah dalam

merancang program-program pembangunan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan. Artikel ini berkontribusi dengan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran, keberhasilan, dan tantangan Gereja Kristen dalam pembangunan sosial pascakonflik di Poso, serta menawarkan implikasi praktis bagi gereja dan pemerintah dalam merancang strategi pemulihan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Gereja, Misi Pembangunan Sosial, Poso, Pasca Konflik, Pasca Konflik 25 Tahun, Trauma, Spiritualitas, Rekonsiliasi.

PENDAHULUAN

Konflik Komunal di Poso adalah serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang menyebabkan kerugian materi dan banyak korban jiwa.¹ Tragedi ini terjadi selama periode 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Terjadinya konflik ini dapat disebabkan oleh rivalitas ekonomi antara penduduk asli Poso, yang sebagian besar beragama Kristen, dan pendatang yang mayoritas beragama Islam. Akibatnya, terjadi kerusuhan massal dengan dampak signifikan, termasuk 557 korban tewas, 384 orang terluka, sekitar 7.932 rumah warga yang hancur, dan sekitar 510 tempat dan fasilitas umum yang terbakar. Perubahan demografi akibat program transmigrasi juga turut berkontribusi pada munculnya konflik ini.² Konflik semacam ini juga biasanya memiliki beberapa fitur, seperti konflik antara kelompok masyarakat yang beragama Kristen dan Muslim, serta melibatkan pemerintah, elit, dan masyarakat.³ Konflik Poso juga menjadi salah satu konflik terlama di Indonesia.⁴

Pemulihan Poso pasca konflik merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Konflik Poso telah menyebabkan pergeseran tampuk pemerintahan daerah/lokal dan kesenjangan sosial ekonomi, yang mempengaruhi tatanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.⁵ Proses pemulihan ini juga melibatkan penataan kembali wilayah Poso agar menjadi wilayah yang damai dan aman, serta membutuhkan upaya yang komprehensif dalam memulihkan keamanan, penegakan hukum, dan rekonsiliasi antar-etnis dan antar-agama.⁶ Selain itu, pemulihan Poso juga

¹ Nanang Wijaya, "Resolusi Konflik Berbasis Budaya oleh Masyarakat Kabupaten Poso," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* (2020): 58-63.

² Agus Setiawan. "Ketahuilah Bagaimana Sejarah Terjadinya Perang Poso (1998-2001)." *munasprok*, February 20, 2023. <https://munasprok.or.id/Ketahuilah-Bagaimana-Sejarah-Terjadinya-Perang-Poso-1998-2001>.

³ Ernita Krisandi, Budi Steyono, Tri Cahyo Utomo, "Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2013): 1-11.

⁴ Wijaya, "Resolusi Konflik Berbasis Budaya," 58-63

⁵ Taufan SP Bustan, "Pemulihan Poso Butuh Waktu Lama," 2016, diakses pada 28 November 2023.

⁶ Tempo.co, "Pemerintah Lakukan Langkah Terpadu untuk Selesaikan Konflik Poso," 2023.

melibatkan redefinisi tindakan sosial dan rekonstruksi identitas masyarakat pasca konflik. Agama dalam konteks masyarakat Poso dianggap sebagai bagian dari proses dan fenomena dialektika, yang terpelihara karena keberadaan orang-orang Poso.

Dalam konteks ini, pemulihan Poso pasca konflik melibatkan upaya untuk membangun kembali identitas sosial dan agama masyarakat yang terdampak konflik. Upaya pemulihan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, termasuk Gereja dan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pemulihan yang berkelanjutan. Sebagaimana Barga, yang dikutip dalam "The Roles Churches Play in Social Welfare and Society," gereja senantiasa memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat yang mereka layani, menyediakan tempat untuk ibadah serta menjadi sumber dukungan kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, maupun penanggulangan ketidakadilan sosial dan isu-isu imigrasi. Gereja telah menjadi pijakan yang memberikan dukungan dan advokasi bagi mereka yang membutuhkan.⁷

Gereja memiliki peran penting dalam mempromosikan pembangunan sosial di Poso, seperti upaya mendukung rekonstruksi pasca-konflik, menyediakan bantuan kemanusiaan, memfasilitasi perdamaian, dan membangun kembali komunitas yang terpengaruh oleh konflik.⁸ Gereja juga terlibat dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian di wilayah tersebut.⁹ Meskipun memiliki peran yang signifikan, gereja juga menghadapi kurangnya sumber daya, tekanan sosial dan politik, serta kompleksitas dalam memfasilitasi rekonsiliasi antar kelompok yang bertikai.¹⁰ Adanya pandangan bahwa Gereja seharusnya fokus pada urusan rohani semata juga menjadi salah satu tantangan dalam upaya mempromosikan pembangunan sosial.¹¹

Mengenai peristiwa konflik komunal ini, kajian dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu telah dilakukan, di antaranya oleh Igneus Alganih, membahas tentang

⁷ Fresh Essays, "The Roles Churches Play in Social Welfare and Society" (March 2023). Selanjutnya untuk sumber berbahasa Inggris diterjemahkan langsung oleh penulis].

⁸ Tim Mimbar Kristen, "Peranan Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial" (31 Oktober 2021), diakses pada 15 Januari 2024.

⁹ Yunus D. A. Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Jaffray*, vol. 14, no. 2 (2016):241-268.

¹⁰ Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom" (2016):241-268.

¹¹ Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom" (2016):241-268.

sejarah konflik tersebut;¹² M. Saleh Laha, Fatmawada Sudarman, Moh. Nutfa mengkaji dampak sosial pasca konflik, dalam “Kehidupan Pascakonflik Dan Ketegangan Relasi Sosial: Suatu Ancaman Kehancuran *Social Capital Trust*”. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Poso masih terikat oleh ingatan konflik masa lalu yang menghambat proses damai. Selain itu, relasi sosial antara etnik pribumi dengan etnik pendatang di Poso juga menjadi fokus penelitian ini.¹³

Nurul Fitriani Panjili, melakukan penelitian terkait rekonsiliasi masyarakat pascakonflik di Poso, “Modal Sosial Komunitas Dalam Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Di Daerah Pascakonflik Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.” Penelitian ini membahas upaya rekonsiliasi masyarakat pasca konflik di Poso, termasuk penguatan modal sosial dan proses pembangunan kembali yang melibatkan aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik Masyarakat.¹⁴ Pada Juni 2014 dilakukan penelitian, “Strategi Pemerintah Daerah Poso Dalam Menghadapi Konflik Sosial.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁵

Selanjutnya oleh Ulum, “Prospek Pembangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas,” Meskipun bukan secara khusus tentang Poso, penelitian ini merupakan upaya untuk memahami perkembangan masyarakat korban konflik Sambas, yang dapat memberikan wawasan terkait pembangunan masyarakat pasca konflik di wilayah lain¹⁶ Bahkan baru-baru ini Yakobus dan yang lainnya, melakukan analisis mengenai penanganan dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur dalam “Analisis Penanganan Teroris Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pasca Konflik di Kab. Poso.”¹⁷

¹² Igneus Alganih, “Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001),” *Jurnal Criksetra* (2016):166-174.

¹³ M. Saleh Laha, Fatmawada Sudarman, Moh. Nutfa, “Kehidupan Pasca Konflik dan Ketegangan Relasi Sosial: Suatu Ancaman Kehancuran *Social Capital Trust*,” *Jurnal Predestination: Jurnal of Society and Culture* (2021): 109-118.

¹⁴ Nurul Fitriani Panjili, “Modal Sosial Komunitas Dalam Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Di Daerah Pascakonflik Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah” (2022), *eprints.ipdn.ac.id*, Diakses pada 13 Januari 2024.

¹⁵ Zulkifli Hi Manna & Inu Kencana Syafie, “Strategi Pemerintah Daerah Poso Dalam Menghadapi Konflik Sosial,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* (2014): 225-256.

¹⁶ Raudatul Ulum, “Prospek Pembangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas,” *Jurnal Analisa*, vol. 20, no. 1 (2013):25-35.

¹⁷ I Ketut Yakobus dan yang lainnya, “Analisis Penanganan Teroris Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pasca Konflik di Kabupaten Poso,” *Jurnal Sosialisasi* (2023): 79-91.

Dari berbagai sumber yang dapat ditemukan saat ini, terkait pembangunan sosial pasca konflik di Poso, kajian tentang "Bagaimana evaluasi kesuksesan atau tantangan yang dihadapi gereja dalam mencapai misi pembangunan sosial di Poso Kota Bersaudara¹⁸ setelah 25 tahun pascakonflik?" tidak ditemukan. Pada saat memasuki seperempat abad pasca-konflik yang melanda Poso, evaluasi terhadap peran gereja Kristen dalam misi pembangunan sosial di Poso Kota Bersaudara menjadi sangat penting. Sebagai pusat keagamaan dan katalisator rekonsiliasi, gereja memiliki peran unik dalam membimbing masyarakat menuju perdamaian berkelanjutan. Namun, dalam kerangka konstruksi teoritis pembangunan sosial pasca-konflik, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengeksplorasi sejauh mana kesuksesan atau tantangan yang dihadapi gereja dalam mencapai misi pembangunan sosial di Poso setelah seperempat abad pasca-konflik.

Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan penelitian dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika pembangunan sosial pasca-konflik di wilayah yang pernah terkena dampak konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesuksesan atau tantangan yang dihadapi gereja dalam mencapai misi pembangunan sosial di Poso setelah 25 tahun pasca-konflik dan peran gereja dalam pembangunan sosial pascakonflik di Poso. Dengan adanya penelitian ini wawasan mendalam tentang peran Gereja dalam pembangunan sosial di Poso Kota Bersaudara dan sejauh mana pencapaiannya dapat diukur sebagai langkah signifikan menuju rekonsiliasi secara holistik, pemulihan spiritual & psikis, hingga pembangunan Masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi gereja dan pemerintah dalam merancang program-program pembangunan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan, serta memberikan kontribusi pada penelitian-penelitian sejenis di daerah konflik lainnya di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Pembangunan Sosial Pascakonflik

Pembangunan sosial pascakonflik merujuk pada upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum setelah terjadinya konflik.

¹⁸ Wilayah yang disebut "Poso Kota Bersaudara" terdiri dari tiga kecamatan yakni, Poso Kota, Poso Kota Utara, dan Poso Kota Selatan. BPS Kabupaten Poso, Statistik Daerah Kabupaten Poso 2021 (Desember 2021), 1.

Hal ini meliputi serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik. Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan tenggang rasa, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik.¹⁹ Sejalan dengan itu, Ulum mengatakan,

Secara umum *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam *community development* adalah kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan.²⁰

Dengan menggunakan istilah “rekonstruksi pascakonflik” Dalam *Encyclopedia Princetoniensis*, Tzifakis menjelaskan bahwa, hal ini merupakan tugas yang kompleks, luas dan beragam yang melibatkan peningkatan simultan dalam standar militer (pemulihan hukum dan ketertiban), politik (administratif), ekonomi (rehabilitasi dan pembangunan) dan sosial (keadilan dan rekonsiliasi).²¹

Lederach (1997), mengusulkan sebuah kerangka kerja konseptual yang terdiri dari struktur, proses, rekonsiliasi, sumber daya, dan koordinasi: Struktur terkait dengan unsur-unsur sistemik yang menangani situasi konflik yang berlarut-larut; Proses mengarah pada sifat jangka panjang perkembangan konflik; Rekonsiliasi menyoroti bahwa hubungan, dalam berbagai dimensi psikologisnya, menjadi fokus transformasi; Sumber daya memfokuskan pada kenyataan bahwa meskipun dukungan keuangan diperlukan, lebih penting adalah mengembangkan pemikiran baru terkait kategori, tanggung jawab, dan komitmen strategis terhadap pembangunan perdamaian; Koordinasi menyoroti kebutuhan akan mekanisme khusus yang memungkinkan keempat komponen di atas untuk berinteraksi, bersinggungan, dan saling memperkaya. Inti dari kerangka kerja ini adalah usulan-usulan bahwa sifat konflik masa kini memerlukan perkembangan teori dan praktik dari “kelompok menengah”.²²

¹⁹ Undang-undang RI, 2012, “Kemenkeu,” *Kemenkeu.go.id*, diakses pada 10 Januari 2024.

²⁰ Raudatul Ulum, “Prospek Pembangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas,” *Jurnal Analisa*, vol. 20, no. 1 (2013):27.

²¹ Nikolaos Tzifakis, “Postconflict Economic Reconstruction,” dalam *Encyclopedia Princetoniensis* (2024), diakses pada 11 Januari 2024, <https://pesd.princeton.edu/node/586>.

²² John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1997).

Selanjutnya mengenai dampak konflik Tzifakis mengatakan, “meskipun konflik-konflik tersebut berbeda dalam hal durasi dan intensitasnya, dampaknya dalam banyak kasus sangat menghancurkan dalam hal sumber daya manusia, sosial, dan fisik.”²³ Dalam rinciannya, dari sepuluh butir yang dicantumkan, ada lima butir yang relevan dengan pembahasan ini, yakni (1) penurunan indikator pembangunan manusia dan keamanan manusia (misalnya angka harapan hidup, kematian bayi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan) (2) memburuknya infrastruktur (misalnya transportasi, komunikasi, air dan pembangkit listrik, perumahan); (3) perpindahan penduduk dan migrasi internal menyebabkan *brain drain* (penipisan sumber daya manusia); (4) Jumlah orang yang membutuhkan dukungan sosial (misalnya penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, pengungsi internal, lanjut usia, kelompok marginal dan veteran perang) akan meningkat. (5) resesi ekonomi, terkadang di bawah tingkat sebelum perang.²⁴

Di sisi lain, spiritualitas dan psikologi juga terdampak konflik. Dampak spiritual dari konflik pada masyarakat dapat mencakup berbagai aspek, seperti tergerusnya tingkat toleransi antar-umat beragama, perubahan dalam praktik keagamaan, dan perubahan dalam persepsi terhadap agama dan spiritualitas. Konflik sosial antar agama yang terjadi di Poso telah menyebabkan tergerusnya tingkat toleransi seluruh masyarakat, sehingga harmoni sosial terganggu. Selain itu, konflik ini juga mempengaruhi praktik keagamaan masyarakat, seperti pembangunan rumah ibadah, serta memengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan fisik pada konflik, demonstrasi/unjuk rasa, dan perasaan agama yang paling benar. Dari perspektif spiritualitas, konflik dapat memengaruhi cara individu merespons konflik dan emosi.²⁵

Dalam konteks konflik Poso, dampak psikologis juga meliputi berbagai aspek, seperti trauma, ketegangan emosional, dan perubahan perilaku. Konflik berskala besar seperti konflik Poso telah meninggalkan dampak psikologis yang signifikan pada masyarakat, terutama pada anak-anak²⁶ dan keluarga. Studi kualitatif di Poso, Indonesia,

²³ Tzifakis, “Postconflict Economic Reconstruction.”

²⁴ Tzifakis, “Postconflict Economic Reconstruction.” Lima butir lainnya adalah: (6) besarnya biaya finansial yang diperoleh dari pengeluaran militer yang besar (di atas pengeluaran sosial) dan pendapatan yang kecil selama perang; (7) meningkatnya inflasi akibat konflik kebijakan moneter; (8) Arus keluar aset yang diinvestasikan ke luar negeri (9) Peningkatan utang yang belum terbayar selama perang; (10) Terganggunya atau Penghentian perdagangan luar negeri.

²⁵ Band. Muh. Abidzar Qiffary Day, Skripsi: *Tingkat Toleransi Antar Umat Beragama di Poso Pasca Konflik: Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Anggota Organisasi yang Beratribut Keagamaan* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 75-104.

²⁶Wietse A. Tol dan yang lainnya, “Communal violence and child psychosocial well-being”: 112-135.

menemukan bahwa konflik komunal telah menyebabkan sejumlah masalah psikososial, termasuk kemiskinan, trauma, perilaku yang tidak sesuai moral, ketegangan antar-agama, dan gangguan psikologis lainnya.²⁷

Dari perspektif spiritual, komunikasi dan penyelesaian konflik juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan penyelesaian konflik dari perspektif spiritual dapat membantu individu dalam mengelola perasaan, pikiran, dan kebutuhan mereka dengan lebih baik.²⁸ Jadi, meskipun sumber yang tersedia memberikan wawasan yang terbatas, dapat disimpulkan bahwa konflik Poso memiliki dampak psikologis yang luas, termasuk trauma, ketegangan emosional, perubahan perilaku, dan gangguan psikologis lainnya pada masyarakat, terutama pada anak-anak dan keluarga.

Dampak lain yang dapat ditemukan dalam konteks konflik Poso adalah fenomena segregasi, mirip dengan yang terjadi di Ambon. Segregasi sosial pascakonflik di Kota Ambon, yang terjadi setelah konflik tahun 1999, telah menyebabkan struktur masyarakat menjadi tersegregasi berdasarkan keyakinan agama, baik secara sosial budaya, ekonomi, politik, dan psikologis.²⁹ Segregasi ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk wilayah permukiman, interaksi sehari-hari, perdamaian komunal, dan kerjasama sosial³⁰ Dengan demikian, dalam konteks konflik Poso, fenomena segregasi dapat memiliki dampak serupa, memengaruhi beragam aspek kehidupan masyarakat.

Tidak lupa juga tentang bagaimana Konflik telah meluluhlantahkan perekonomian telah terbukti di banyak tempat, dalam "Jurnal Economic Modelling," para peneliti mengatakan,

Bukti sejarah menunjukkan bahwa konflik menyebabkan penderitaan manusia yang sangat besar dan memiliki biaya ekonomi dan sosial yang besar (Rodrik, 1999) karena hilangnya nyawa manusia, kehancuran infrastruktur, terganggunya tenaga kerja dan sumber daya manusia, melemahnya institusi pemerintah, ketidakstabilan politik, dan meningkatnya ketidakpastian. Dampak dari kerugian ini terus berlanjut selama bertahun-tahun setelah konflik, sehingga menyulitkan masyarakat yang terkena dampak untuk keluar dari "perangkap konflik" (Cerra dan Saxena, 2008).³¹

²⁷Wietse A. Tol dan yang lainnya, "Communal violence and child psychosocial well-being": 112-135.

²⁸Willa Williams, "5 Reasons to Communicate and Resolve Conflict from a Spiritual Perspective".

²⁹ Tim SNP-K-THC, *Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pascakonflik di Ambon (Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan)* (Depok: SNP-K-THC, 2014), 32.

³⁰ Rizal Panggabean, "Penghindaran Positif, Segregasi, dan Kerjasama Komunal di Maluku (2020)," PUSAD Yayasan Wakaf Paramadina, www.paramadina-pusad.or.id.

³¹ Thai-Ha Le, Man-Thien Bui dan Gazi Salah Uddin, "Economic and social impacts of conflict: A cross-country analysis," *Economic Modelling*, vol. 115 (2022):1. [Terj. Langsung]

Fakta tersebut juga tidak terhindarkan di daerah Poso pascakonflik. Meski Pemerintah serta pihak lainnya telah berupaya mengatasi hal ini, bukan berarti Gereja dapat bersikap tak acuh. Demikianlah, Pembangunan sosial pascakonflik memang terkait berbagai dimensi, yakni pemulihan fisik dan mental masyarakat, rekonsiliasi, pencegahan konflik, peningkatan modal sosial, reintegrasi dan sebagainya, pula melibatkan semua unsur dalam masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap hal-hal ini menjadi kunci untuk membangun masyarakat inklusif dan berkelanjutan.

Gereja dalam Misi Pembangunan Sosial

Gereja, dalam pengertian praktisnya, merujuk pada organisme dan organisasi. Dari segi organisme, gereja diartikan sebagai setiap individu yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, sebagaimana dalam 1 Petrus 2:9-10. Gereja memiliki hubungan pribadi dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, seperti terungkap dalam Yohanes 1:12 dan Yohanes 17:3.³² Dari sisi organisasi, gereja menunjukkan persekutuan pribadi-pribadi dalam sebuah komunitas yang memerlukan keteraturan. Dalam misinya, gereja diutus oleh Kristus ke dunia, namun bukan berasal dari dunia. Dalam interaksinya dengan dunia, gereja menyaksikan kebesaran Allah. Di sisi lain, orang percaya sebagai bagian dari gereja dihadapkan pada berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu sosial lainnya yang menjadi perhatian masyarakat umum.³³

Dalam konteks pembangunan sosial, istilah "gereja" merujuk pada dimensi bersifat universal, mengingat peran ini harus diemban oleh seluruh entitas yang diidentifikasi sebagai "gereja," baik aspek personal, denominasional, maupun universal. Keberhasilan gereja dalam melaksanakan misi pembangunan sosial juga tidak dapat mencapai puncak optimalnya jika dilakukan secara terfragmentasi. Kolaborasi dan koordinasi yang kokoh antara individu, denominasi, dan entitas gerejawi universal menjadi imperatif untuk mengoptimalkan dampak positif dalam upaya pembangunan sosial.

Di sinilah Gerakan Oikoumene dapat memainkan peran sesuai tujuan & semangatnya yakni sebagai pemersatu,³⁴ serta mempromosikan toleransi, saling

³² Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom" (2016):242

³³ Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom" (2016):242

³⁴ Daniel Lukas Lukito, "Kecenderungan Gerakan Oikoumene Dewasa ini" (1991), repository.seabs.ac.id, www.seabs.ac.id diakses pada 17 Januari 2024.

menghargai, dan kerja sama di antara agama-agama besar di dunia. Secara praktis, Gerakan Oikumene telah berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui berbagai cara, termasuk: (1) Komitmen untuk kerukunan antar umat beragama; (2) Pemberian bantuan sosial; (3) Partisipasi dalam kegiatan pembangunan, seperti pembangunan gereja dan fasilitas keagamaan.³⁵

Adapun Kuyper menilai, bahwa gereja Kristen saat ini cenderung mengabaikan peran aktifnya di bidang sosial. Selain melakukan tindakan karitas dan pelayanan pendidikan serta kesehatan yang terkadang kehilangan visi kristiani, gereja umumnya gagal memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁶ Hal ini disebabkan oleh pemahaman keliru di kalangan umat Kristen, yang menganggap iman mereka hanya relevan untuk kehidupan rohaniah pribadi dan tidak berkaitan dengan aspek kehidupan publik. Oleh karena itu, iman Kristen yang sejati harus terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ranah sosial dan politik.³⁷

Meski demikian, beberapa fakta menunjukkan bahwa Gereja Kristen telah berperan besar dalam pembangunan sosial, katakanlah dalam beberapa hal di bawah ini,

- (1) Membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dengan mempersiapkan umat Kristiani untuk bertindak secara moral;³⁸
- (2) Gereja telah menjadi wadah penting bagi pembentukan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;³⁹
- (3) Gereja sebagai organisasi sosial dalam masyarakat, dengan fungsi eksternalnya, berarti Gereja paling tepat berperan sebagai sarana pengembangan masyarakat;
- (4) Gereja dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan;
- (5) Dalam pengembangan sumber daya, Gereja menjadi tempat yang aman untuk mengembangkan sumber daya masyarakat, baik secara individu maupun bersama.

<https://repository.seabs.ac.id/bitstream/handle/123456789/676/Kecenderungan%20gerakan%20Oikumene%20dewasa%20ini.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

³⁵ "Oikumenisme," Wikipedia, www.id.wikipedia.org, diakses pada 17 Januari 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Oikumenisme>

³⁶ Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom" (2016):243

³⁷ Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom" (2016):243

³⁸ Wahana Visi Indonesia. "Gereja kristen dan Kontribusinya dalam Mewujudkan Kesejahteraan," 2022, diakses pada 20 Desember 2023, <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/gereja-kristen-dan-kontribusinya-dalam-mewujudkan-kesejahteraan>.

³⁹ S. Henderina A. Pello, Philipus Sunardi, Junius Nayoan, "Peran Gereja dalam Pembangunan Karakter sebagai Bentuk Tanggung Jawab Membangun Bangsa," *Prosiding Pelita Bangsa* (2021): 156-160.

Modal sosial yang dihasilkan dari Gereja memungkinkan pencapaian tujuan dan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan hayati;

- (6) Gereja juga telah secara obyektif kritis terhadap sistem kemasyarakatan yang berlaku dan berusaha untuk memperhatikan mereka yang tertindas, mereka yang kalah, dan tertinggal dalam sistem yang manusia sendiri ciptakan;⁴⁰
- (7) Dalam masalah konflik komunal, rekonsiliasi & *recovery* telah diperjuangkan.⁴¹

Selama ini Gereja Kristen telah menjadi alat penting dalam pembangunan sosial (band. Yer. 29:7) sebagaimana identitas & panggilannya (1 Kor 1:2; 1 Ptr 2:9; Ef. 1:21; 1 Kor. 3). Gereja memiliki peran pembangunan sosial pasca konflik, terutama upaya rekonsiliasi, reintegrasi sosial, dan penguatan modal sosial. Beberapa konsep teoritis yang menggambarkan hubungan antara gereja dan pembangunan sosial pasca konflik adalah:

- (1) Kohesi Sosial: Gereja dapat memainkan peran penting meningkatkan kohesi sosial pascakonflik dengan membangun jaringan dan komunikasi yang baik antara masyarakat;⁴²
- (2) Pembaruan dalam Seluruh Aspek Kehidupan Manusia: Gereja Kristen harus terlibat dalam pembangunan bangsa dan mendukung pembaruan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.⁴³
- (3) Reintegrasi Sosial: Gereja Kristen dapat memainkan peran dalam reintegrasi sosial pasca konflik dengan mendukung proses penggabungan masyarakat yang terlibat dalam konflik dan mengatasi kesuksesan yang dihadapi masyarakat.⁴⁴
- (4) Penguatan Modal Sosial: Gereja dapat membantu mengatasi keterlambatan sosial dan ekonomi masyarakat pasca konflik dengan memungkinkan penggabungan sumber daya manusia yang ada, seperti sumber daya manusia yang terdapat di Gereja Kristen.⁴⁵

⁴⁰ Samuel M. Hese gem. "Sikap GKI TP Klasis Balim Yalimo kepada Jemaat Beithel Polimo Kurima tentang Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Khusus." *Tesis*. Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2016.
<https://repository.uksw.edu//handle/123456789/10517>.

⁴¹ Innocentius Larat, "Peran Gereja Katolik dalam Memperjuangkan Kemanusiaan atas Konflik di Maluku," *Jurnal Fides et Ratio* (2023): 48-62.

⁴² Soumokil Tontji. "Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku." Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2011.
<https://repository.uksw.edu//handle/123456789/734>.

⁴³ Ezra Tari, Jeni Isak Lele, "Gereja dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini," *Jurnal Teruna Bhakti*, Vol. 3, No. 1, (Agustus 2020):25-35.

⁴⁴ Soumokil Tontji. "Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku", BAB II.

⁴⁵ Soumokil Tontji. "Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku", BAB II.

(5) Keterbukaan Informasi Publik: Gereja Kristen dapat berkontribusi dalam pemberian informasi publik dan pembangunan perdamaian di daerah-daerah pasca konflik, seperti yang dilakukan di Aceh.⁴⁶

Salah satu faktor krusial yang memengaruhi kelangsungan pembangunan sosial pasca konflik adalah pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen memiliki peran sentral dalam membentuk perdamaian dan karakter generasi muda setelah terjadinya konflik sosial.⁴⁷ Dimulai dari lingkungan keluarga, individu yang mengikuti ajaran Kristen dididik untuk mengamalkan kasih terhadap Allah dan sesama manusia, yang mencerminkan nilai-nilai perdamaian. Pendekatan ini membentuk dasar-dasar karakter yang dianggap krusial dalam konteks rekonstruksi sosial pasca konflik.⁴⁸ Dalam ranah ini, pendidikan kewarganegaraan dapat diterapkan, dengan tujuan melatih siswa agar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, termasuk konflik-konflik sosial yang muncul dalam tradisi *social studies* sebagai refleksi.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, yang dapat diaplikasikan dalam konteks kewarganegaraan.⁴⁹ Kedua entitas, yakni Islam dan Kristen, memegang peran yang signifikan dalam proses pemulihan dan rekonstruksi integrasi sosial pasca konflik.⁵⁰ Melalui peran mendidik, gereja dapat membangun iman Kristen dan membangun karakter generasi muda pasca konflik sosial. Kontribusi ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memberikan panduan praktis berdasarkan prinsip Alkitabiah. Dengan demikian, Pendidikan Agama Kristen memainkan peran integral dalam membentuk nilai-nilai positif pada generasi muda, memberikan dampak signifikan pada konteks pasca konflik sosial.⁵¹ Gereja memegang peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan

⁴⁶ Afrizal Tjoetra Dan Sudarman, "Keterbukaan Informasi Publik Dan Pembangunan Perdamaian Aceh" (2016), PPID-Aceh, ppid2.acehprov.go.id, diakses pada 15 Januari 2024. <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/articles/read/60>

⁴⁷ Imelda Butarbutar, Dyoys Rantung, Lamhot Naibaho, "Pendidikan Perdamaian dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen Sebagai Upaya Meminimalisasi Konflik dan Kekerasan Antar Mahasiswa di Universitas HKBP Nommensen Medan," Vol. 4 ,No. 6, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (2022):6962-6972. Diakses pada 17 Januari 2024, file:///C:/Users/ACER/Downloads/9416-Article%20Text-28750-2-10-20221128.pdf.

⁴⁸ Imelda Butarbutar, "Pendidikan Perdamaian dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen."

⁴⁹ Laros Tuhuteru, "Pengaruh Situasi Pasca Konflik Sosial Terhadap Pembelajaran Pkn Di Sekolah," Vol. 6 No.1, *Jurnal PEKAN* (2021):50-65. Diakses pada 17 Januari 2024, file:///C:/Users/ACER/Downloads/1167-3733-1-SM.pdf

⁵⁰ Retnowati, "Agama, Konflik, Dan Integrasi Sosial," *Jurnal Analisa*, Vol. 21, No. 02 (2014):189-200. Diakses pada 17 Januari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/41938-ID-agama-konflik-dan-integrasi-sosial-integrasi-sosial-pasca-konflik-situbondo.pdf>

⁵¹ Imelda Butarbutar, "Pendidikan Perdamaian dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen."

sosial pasca konflik, menjadi elemen integral yang mendorong proses pemulihan masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh peran gereja.

Tercapainya misi pembangunan sosial pascakonflik dapat mencakup beberapa hal berikut:

- (1) Reintegrasi Sosial: Indikator ini mencakup proses penggabungan kembali individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik ke dalam masyarakat secara damai dan berkelanjutan.⁵²
- (2) Pemulihan dan Stabilisasi Komunitas: Indikator ini mencakup pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang terdampak konflik, serta stabilisasi komunitas pasca-konflik.
- (3) Rekonsiliasi: Keberhasilan dalam mencapai rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik menjadi indikator penting dalam pembangunan sosial pascakonflik.
- (4) Pemenuhan Keadilan: Ini mencakup upaya pemenuhan keadilan bagi korban konflik dan penyelesaian atas masalah-masalah konflik serta dampak konflik di masa lalu.⁵³
- (5) Pencegahan Konflik Kembali: Keberhasilan dalam mencegah konflik kembali muncul dan memastikan berlangsungnya pemecahan atas masalah-masalah konflik dan dampak konflik di masa lalu juga menjadi indikator tercapainya misi pembangunan sosial pascakonflik. Sebagaimana harapan yang tertuang dalam Undang-Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial.⁵⁴

Indikator-indikator ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pembangunan sosial pascakonflik dan memastikan tercapainya perdamaian, rekonsiliasi, dan keadilan dalam masyarakat yang terdampak konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif⁵⁵ untuk mendalami dan merinci pemahaman tentang evaluasi kesuksesan atau tantangan yang dihadapi Gereja Kristen

⁵² "Bab Dua Reintegrasi Sosial," repository.uksw.edu, diakses pada 15 Januari 2024

⁵³ Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik" (2009), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 13, no. 1:48-70. Diakses pada 15 Januari 2024.
<https://core.ac.uk/download/pdf/294858486.pdf>

⁵⁴ Undang-undang RI, 2012, "Kemenkeu."

⁵⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), 15-16.

dalam mencapai misi pembangunan sosial di Poso Kota Bersaudara setelah 25 tahun pascakonflik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang yang luas untuk eksplorasi mendalam melalui tinjauan literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan hal-hal lainnya. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.⁵⁶

Tinjauan Literatur: Tinjauan literatur akan menjadi langkah awal dalam memahami kerangka konseptual dan teoritis pembangunan sosial pasca-konflik serta peran Gereja Kristen dalam proses ini. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini akan merinci konsep-konsep kunci seperti rekonsiliasi, transformasi konflik, dan partisipasi masyarakat. **Observasi:** Observasi lapangan akan menjadi elemen penting dalam mengumpulkan data mengenai pelaksanaan misi pembangunan sosial oleh Gereja Kristen di Poso. Observasi ini akan memungkinkan peneliti untuk secara langsung melihat dan mendokumentasikan interaksi serta kegiatan yang dilakukan oleh Gereja dan masyarakat setempat, memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam.

Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pemimpin gereja, anggota masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman mendalam mengenai peran Gereja Kristen dalam pembangunan sosial di Poso. Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan evaluasi mereka terhadap upaya pembangunan sosial yang dilakukan oleh Gereja. **Pemilihan Informan Kunci:** Pemilihan informan kunci akan dilakukan secara strategis untuk memastikan keberagaman dan representasi pandangan dari berbagai segmen masyarakat. Pemimpin gereja, anggota masyarakat, dan individu dari kelompok terdampak konflik akan menjadi informan kunci yang memberikan perspektif yang holistik terhadap evaluasi kesuksesan atau tantangan yang dihadapi Gereja Kristen.

Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik-teknik seperti analisis isi dan perbandingan konstan. Proses analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan dalam pandangan dan pengalaman yang muncul selama wawancara dan observasi.⁵⁷

⁵⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 7

⁵⁷ Band. Meleong, *Metodologi Penelitian*.

Melalui kombinasi metode riset kualitatif ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap peran Gereja Kristen dalam pembangunan sosial pasca-konflik di Poso, sekaligus merinci evaluasi kesuksesan atau tantangan yang dihadapinya setelah 25 tahun pascakonflik.

HASIL

Kesuksesan Pembangunan Sosial Pascakonflik di Kabupaten Poso pada umumnya serta Poso Kota Bersaudara secara khusus, tidak lepas dari kiprah Gereja Kristen yang telah mengerahkan segala daya upaya dalam mengambil peran pada dimensi-dimensi terkait kondisi Masyarakat pascakonflik. Bahwa Gereja telah menjawab kebutuhan umat dan Masyarakat luas telah terlihat sejak proses rekonsiliasi. Namun demikian, peran Gereja dalam Pembangunan Sosial di Poso Kota Bersaudara setelah seperempat abad pascakonflik ini, masih jauh dari sempurna sehingga memerlukan koreksi dan tambahan di sana-sini.

Menurut Gubernur Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Adiman, Setelah 25 tahun pasca konflik di Poso, Sulawesi Tengah, Gereja secara organisasi dalam hal ini Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) telah berperan dalam berbagai program pembangunan sosial. Meskipun informasi spesifik terkait program-program tersebut tidak banyak terdokumentasikan, beberapa artikel memberikan gambaran umum tentang peran GKST dalam pembangunan daerah.⁵⁸ Selain itu, implementasi kebijakan penanggulangan konflik juga menjadi bagian dari upaya pembangunan sosial.⁵⁹

Konteks “Gereja” di Wilayah Poso Kota Bersaudara

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2020, sekitar 60,80% (151.261 jiwa) penduduk Kab. Poso memeluk agama Kristen, dengan 59,45% (147.899 jiwa) menganut Protestan dan 1,35% (3.362 jiwa) menganut Katolik. Sementara itu, pemeluk agama Islam berjumlah 33,60% (83.597 jiwa), Hindu 5,60% (13.937 jiwa), dan sebagian kecil menganut agama Buddha, yaitu kurang dari 0,01% (4 jiwa).⁶⁰ Data BPS Kab. Poso, tahun

⁵⁸ Redaksi Harian Mercusuar, “GKST Berperan Penting dalam Pembangunan Daerah,” 2023, diakses tanggal 23 November 2023, <https://mercusuar.web.id/sulteng-membangun/gkst-berperan-penting-dalam-pembangunan-daerah/>

⁵⁹ Risaldy Kalembiro, Tesis: *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah)* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), 104-112.

⁶⁰ “Kabupaten Poso,” Wikipedia, www.id.wikipedia.org, diakses pada 16 Januari 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Poso#Kecamatan.

2014 menunjukkan perbandingan persentase umat Islam dan Kristen di sejumlah wilayah di Kabupaten Poso. Bahwa mayoritas penduduk di wilayah Poso Kota Bersaudara memeluk agama Islam (Poso Kota, Islam: 98,53%, Kristen: 1,16%. Poso Kota Utara, Islam: 87,73%, Kristen: 11,49%. Poso Kota Selatan, Islam: 26,33%, Kristen: 73,28%), sementara mayoritas di wilayah lainnya memeluk agama Kristen.⁶¹

Adapun Di wilayah Poso Kota Bersaudara terdapat Empat Puluh Dua (42) Gereja Lokal, serta Tiga Belas (13) denominasi yang tersebar di tiga kecamatan. Di Poso Kota: Dua (2) gereja, Poso Kota Utara: Sembilan (9), dan Poso Kota Selatan: Tiga Puluh Satu (31) gereja.⁶² Data ini memberikan konteks penting terkait dengan latar belakang agama di wilayah penelitian. Hal ini juga menunjukkan bahwa wilayah Poso Kota Bersaudara memiliki dinamika agama yang unik, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun terdapat juga keberagaman agama Kristen yang signifikan, yang tercermin dari jumlah gereja dan denominasi yang ada di wilayah tersebut.

Dalam konteks penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam melaksanakan misi pembangunan sosial di Poso setelah 25 tahun pasca konflik, data ini menjadi landasan penting untuk memahami keragaman agama dan persebaran gereja di wilayah ini. Selain itu, data ini juga dapat menjadi dasar untuk memahami dinamika sosial dan agama yang memengaruhi pelaksanaan misi pembangunan sosial gereja di wilayah Poso Kota Bersaudara.

Rekonsiliasi

Sejumlah langkah signifikan yang dilakukan oleh pemerintah, Gereja, Lembaga Adat serta organisasi Islam di Poso dalam upaya mencapai perdamaian di Poso. Pembentukan kelompok oleh para Gubernur Sulawesi, yang terdiri dari 13 ketua dewan adat yang diberi nama Rujuk Sintuwu Maroso, yang artinya 'Membangun Kesatuan yang Kuat'. Tanggal 22 Agustus 2000, Presiden Wahid secara pribadi datang ke Poso, di mana kesepakatan dari Rujuk Sintuwu Maroso dibacakan di hadapan Presiden menggunakan bahasa Pamona.⁶³

⁶¹ "Pemeluk Agama Menurut Kecamatan (persen), 2012-2014," Badan Pusat Statistik Kab. Poso, www.posokab.bps.go.id.

⁶² Arsip Kementerian Agama Kab. Poso (2023).

⁶³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia and the Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre), *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso* (Lausanne: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011), 58.

Tahap awal konflik juga melibatkan peran aktif dari Bupati Arif Patanga. Pada malam tanggal 24 Desember 1998, setelah terjadinya kerusuhan, Bupati ini mengadakan pertemuan penting, yaitu Musyawarat Pimpinan Daerah (MUSPIDA) pada malam tanggal 25 Desember. Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk parlemen setempat, militer, polisi, pengacara, hakim, pemimpin agama, dan komunitas. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan strategi mengatasi kekerasan dan menemukan solusi bersama.⁶⁴

Pada November 2001, Arnold R. Tobondo,⁶⁵ mengambil langkah penting dengan pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Susilo Bambang Yudhoyono), Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat (Jusuf Kalla), dan Menteri Pertahanan (Abdul Jalil). Tobondo memohon kepada pemerintah untuk aktif mengatasi konflik di Poso. Tindakan ini menunjukkan kesiapan komunitas Kristen secara umum untuk mencapai perdamaian.⁶⁶ Jadi, meski kepada *Tribun Timur.Com* Tobondo mengatakan, “Puang jusuf Kalla orang pertama yang berinisiatif kedamaian di Sulteng,”⁶⁷ namun pada dasarnya upaya perdamaian ini merupakan inisiatif Arnold Tobondo, di bawah naungan sinode Gereja GKST, yang menghubungi Menkopolhukam, Susilo Bambang Yudhoyono, Menkokesra, Jusuf Kalla, dan Menhan, Abdul Jalil.

Pada peristiwa tersebut, Tobondo mendapatkan respon positif oleh pemerintah melalui Menkokesra, Jusuf Kalla yang kemudian ditunjuk untuk memimpin mediasi dalam upaya perdamaian di Poso. Karena ia berasal dari Sulawesi dan juga memiliki jaringan yang luas dan kuat di Sulawesi.⁶⁸ Dalam lingkungan komunitas Kristen itu sendiri, terjadi pertemuan pemimpin komunitas di Tentena. Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan wakil-wakil yang akan dikirim ke perundingan damai di Malino. Sebanyak dua puluh tiga delegasi diambil dari seluruh daerah konflik, melibatkan perwakilan dari akademisi, pemuda, dan pemimpin agama. Dua wanita dari komunitas

⁶⁴ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 57.

⁶⁵ Pdt. (Em.) Arnold Tobondo adalah Mantan Ketua Sinode GKST yang menjabat ketika konflik Poso berlangsung.

⁶⁶ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 60.

⁶⁷ Faqih Imtiyaz, “Pdt Arnold Tobondo Kenang Perjuangan JK Damaikan Poso 2001: Dia Ditakdirkan Tuhan Selamatkan Bangsa,” 2023, diakses pada 5 Desember 2023, <https://makassar.tribunnews.com/2023/05/15/pdt-arnold-tobondo-kenang-perjuangan-jk-damaikan-poso-2001-dia-ditakdirkan-tuhan-selamatkan-bangsa>

⁶⁸ T.n., “Bab III Kota Poso: Tempat Tinggal Masyarakat.”

Kristen Tentena ikut serta dalam perundingan damai di Poso, menunjukkan keterlibatan merata dari berbagai lapisan masyarakat Kristen dalam upaya mencapai perdamaian.⁶⁹

Sejak awal, dalam proses rekonsiliasi, Pelayanan Gereja terhadap umat telah menunjukkan hasil yang signifikan. Aditjondro, mengungkapkan,

Sementara sepuluh butir kesepakatan Deklarasi Malino (19-20 Desember 2001, Pen.) mulai disosialisasikan, gangguan keamanan di Kabupaten Poso dan Morowali, yang telah dimekarkan dari kabupaten induknya, mulai berubah bentuk. Baku serang di antara kedua komunitas praktis sudah tidak terjadi, dan gangguan keamanan berubah bentuk menjadi teror dari 'kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi' terhadap rakyat di kedua kabupaten itu.⁷⁰

Artinya bahwa Masyarakat Kristen di Wilayah Poso, secara konsisten telah memegang komitmen bersama yang tertuang dalam Deklarasi Malino. Hal ini merupakan indikator kesuksesan Gereja dalam pembinaan Jemaat dalam konteks rekonsiliasi. yang dihadapi oleh Gereja Kristen dalam melaksanakan misi pembangunan sosial di Poso termasuk mengatasi gangguan keamanan. Tantangan yang berubah bentuk setelah konflik, serta mempertahankan komitmen bersama dalam konteks rekonsiliasi. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja telah memainkan peran yang signifikan dalam pembinaan jemaat dan mencapai kesuksesan dalam konteks rekonsiliasi, yang tercermin dalam komitmen bersama yang tertuang dalam Deklarasi Malino.

PEMBAHASAN

Pelayanan Multidimensi

Dalam upaya memelihara ketentraman, mempromosikan kerukunan, serta berkontribusi pada proses pemulihan dan pembangunan masyarakat, gereja-gereja di kawasan Poso Kota Bersaudara terus berdedikasi untuk menjalankan peran mereka. Walaupun menghadapi berbagai kendala, upaya pelayanan multidimensi terus dilakukan.

⁶⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 60.

⁷⁰ George Junus Aditjondro, "Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya," Makalah untuk diskusi bertema: "Penerapan Keadaan Darurat di Aceh, Papua dan Poso Dalam Pemilu 2004?" yang diselenggarakan oleh ProPatria pada hari Rabu, 7 Januari 2004 di Ruang Betawi-3, Hotel Santika, Jakarta. Diakses pada 9 Januari 2024 dari www.academia.edu/29706102/Kerusuhan_Poso_Dan_Morowali_Akar_Permasalahan_Dan_Jalan_Keluarnya.

Pendidikan

Seiring berjalannya waktu, 25 tahun pasca konflik Poso, Gereja terus memainkan peran sentral dalam upaya pembangunan sosial, seperti tercermin dalam dukungan mereka terhadap program-program inovatif. Salah satu contohnya adalah respons positif gereja terhadap pembangunan Universitas Kristen Tentena yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada tahun 2007.⁷¹ Langkah ini menunjukkan bahwa Gereja memiliki peran proaktif dalam mengatasi tantangan sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh komunitas Kristen di Tentena. Dengan membangun universitas, Gereja tidak hanya memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kristen, tetapi juga mendukung pembentukan intelektual dan kultural di dalam komunitas tersebut.

Selain itu, Peran Gereja dalam dimensi pendidikan di Poso Kota Bersaudara dapat dicerminkan melalui keberlanjutan dan perkembangan sekolah-sekolah Kristen dari tingkat Usia Dini hingga Menengah Atas. Keberlanjutan sekolah-sekolah Kristen menunjukkan komitmen Gereja dalam memberikan kontribusi positif pada sektor pendidikan di lingkungan tersebut. Dengan mempertahankan sekolah-sekolah Kristen, Gereja tidak hanya memberikan akses pendidikan kepada komunitasnya, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Hal ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas keagamaan siswa-siswi, sambil tetap membuka pintu bagi keragaman dan inklusivitas. Meskipun fenomena segregasi agamis nampak begitu kental, terlihat dari mayoritas pendaftar di setiap sekolah, upaya pengembangan sekolah-sekolah Kristen ini mencerminkan kepentingan Gereja dalam memajukan sektor pendidikan sebagai bagian integral dari misi pembangunan sosial.

Penyampaian pesan budaya damai melalui pendidikan juga dilakukan di daerah konflik lainnya, seperti di Kalimantan Barat. Dalam penelitiannya yang bertajuk, "Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama Pada Sekolah Menengah Atas Di Daerah Pasca Konflik," Atmanto mengungkapkan, "Pendidikan Agama memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan budaya damai."⁷² Dengan demikian, peran Gereja dalam dimensi pendidikan di Poso tidak hanya terbatas pada penyediaan

⁷¹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 62.

⁷² Nugroho Eko Atmanto, "Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama Pada Sekolah Menengah Atas Di Daerah Pasca Konflik (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang & SMA Shalom Bengkayang)," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi)* (2017):165. DOI: 10.18784/smart.v3i2.513

fasilitas pendidikan Kristen, tetapi juga melibatkan aspek pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual dalam proses pendidikan. Keberlanjutan sekolah-sekolah Kristen dari tingkat Usia Dini hingga Menengah Atas memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat setempat, sambil menciptakan fondasi pendidikan yang kuat yang mencakup nilai-nilai keagamaan. Adapun kendala dan peluang yang dapat ditemukan dalam dimensi Pendidikan adalah Meskipun pendaftaran siswa-siswi masih didasarkan pada kriteria agama, Gereja secara konsisten mempertahankan dan bahkan terus mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan ini.

Ekumenis

Di wilayah Poso Kota bersaudara, Gereja-gereja melakukan berbagai program yang telah berdampak signifikan bagi Pembangunan sosial. Pada tahun 2019, Persekutuan Oikoumene Gereja-gereja se-Kelurahan Ranononcu didirikan sebagai langkah berani dalam memperkuat kerjasama antar-gereja di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk memajukan visi Pembangunan Sosial di wilayah ini. Pada tahap awal penelitian ini, peneliti berkesempatan untuk berbicara dengan Atriadi Usman yang telah menjadi gembala Gereja Bethany Ranononcu sejak tahun 2008 dan merupakan penggagas utama bersama Martinus Elvis Bonggili yang mewakili Bimas Kristen Poso.

Program-program yang dijalankan oleh Persekutuan Oikoumene ini mencakup ibadah rutin bulanan, perayaan Natal dan Paskah bersama, pelayanan diakonia anggota, Pelatihan Ekonomi Kreatif, serta proses kesepakatan hubungan dan pembinaan jemaat. Dalam wawancara tersebut Usman menerangkan bahwa, "Ibadah rutin bulanan menjadi fondasi utama bagi kerjasama antar-gereja, sementara kegiatan Natal dan Paskah bersama bertujuan mempererat semangat kebersamaan di antara seluruh anggota gereja."⁷³

Dalam perjalanan implementasinya, persekutuan ini juga menghadapi beberapa kendala. Menjawab pertanyaan mengenai "apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini?" ia menjawab, bahwa "Mutasi gembala sidang yang dilakukan secara periodik pada beberapa denominasi. Karena akibat dari mutasi ini rekan-rekan hamba Tuhan perlu beradaptasi."⁷⁴ Ada pula kendala lain yang diamati oleh Usman,

⁷³ Atriadi Usman (Gembala Sidang Gereja Bethany & Pendiri Persekutuan Oikoumene Kel. Ranononcu), Wawancara oleh Penulis, Gereja Bethany Poso, 9 Desember 2023.

⁷⁴ Usman, Wawancara.

menurutnya, “juga terdapat eksklusifisme dan sikap antipati di kalangan jemaat awam serta masalah hubungan antar keluarga yang seringkali terbawa dalam pelayanan bersama. Hal-hal ini seringkali menyulitkan.”⁷⁵

Meski begitu, dampak positif dari Persekutuan Oikoumene sangat terlihat. Mengenai hal ini, Usman menjelaskan bahwa,

Kerjasama ini meningkatkan kedekatan dan solidaritas antara gereja-gereja di Ranononcu. Rasa persaudaraan di antara jemaat semakin kuat, menciptakan atmosfer harmonis. Komunikasi terbuka antar pemimpin gereja juga mempercepat penyelesaian persoalan yang muncul, menciptakan hubungan yang erat di antara para pelayan Tuhan dan kolaborasi yang lebih baik.⁷⁶

Dengan demikian, Persekutuan Oikoumene Gereja-gereja se-Kelurahan Ranononcu telah membawa dampak positif yang signifikan dalam mempererat hubungan antar gereja dan meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Kendati dihadapkan pada beberapa tantangan, semangat kerjasama ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi gereja-gereja lain dalam upaya pembangunan sosial dan memberikan dampak positif di wilayah mereka.

Semangat ini juga dianggap urgen, bahkan di wilayah yang tidak mengalami konflik yang terkait perbedaan Agama, seperti di daerah Toraja. Sebagaimana dalam penelitiannya, Sapan mengatakan “dalam membangun semangat ekumenis, saling menghormati antar denominasi sangat penting. Hal ini penting, selain membangun hubungan baik dengan anggota gereja lain kerjasama dalam melayani Tuhan dan umat-Nya.”⁷⁷ Meskipun persekutuan ini baru pertama kali dilakukan di wilayah Poso Kota Bersaudara, namun isu tereduksinya semangat ekumenis di gereja-gereja sebenarnya bukan merupakan hal baru. Perlu diakui bahwa tantangan ini bukanlah isu yang baru dan perlu terus mendapat perhatian agar semangat ekumenis di gereja-gereja dapat terus berkembang dan menjadi bagian integral dari upaya mencapai persaudaraan dan kerukunan umat beragama.

Hubungan Antarumat

Peluncuran “Moderasi Beragama di Indonesia,” merupakan program yang bertujuan untuk membangun kehidupan beragama yang moderat dan memperkuat

⁷⁵ Usman, Wawancara.

⁷⁶ Usman, Wawancara.

⁷⁷ Lih. Erwin Bunga Sapan, “Oikoumene: Kehidupan Oikoumene Gereja Toraja Dengan Gereja Pentakosta di Indonesia Bagi Kehidupan Bermasyarakat di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja,” *Kamasean: Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 2, No. 1 (2021):59-75.

kerukunan umat beragama di Indonesia.⁷⁸ Program ini diprakarsai oleh Kementerian Agama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Majelis Keagamaan Buddha, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta tokoh agama dan masyarakat.⁷⁹ Program tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti pencahangan Tahun Toleransi, pembentukan desa moderasi, dan pembentukan desa moderasi beragama. Program ini juga mencakup upaya untuk memerangi misinformasi dan mendorong moderasi beragama arus utama.⁸⁰

Pada tanggal 6 Desember 2023, Peneliti melakukan wawancara yang menarik dengan Ratna Lagonda, Ketua Majelis Klasis Gereja GKST Klasis Poso Kota. Dalam kesempatan tersebut, beliau menguraikan dengan antusias program konkrit yang dilakukan oleh Gereja dalam mendukung kerjasama antaragama, khususnya dalam program Moderasi Beragama. Lagonda mengatakan, “tema dari kegiatan-kegiatan kami adalah ‘Merawat Kerukunan & Merajut Kebersamaan.’”⁸¹ Gereja GKST Klasis Poso Kota menginisiasi program ini dengan tujuan memperkuat hubungan antaragama di wilayah tersebut. Lagonda, juga berbagi tantangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program ini. Ia mengatakan bahwa, “selama pelaksanaan program ini, kami menggunakan biaya sendiri, tidak ada dukungan dari pihak lain, terutama PEMDA.”⁸² Di sini, kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Poso menjadi kendala utama yang disoroti.

Sementara itu, menurutnya, “ada sikap pesimis dan antipati dari beberapa pemimpin gereja. Hal ini menciptakan tantangan internal yang perlu di atasi.”⁸³ Menurut keterangannya, juga nampak tantangan psikologis muncul. Ia mengatakan “ada rasa curiga dan was-was dari masyarakat umum, serta jemaat gereja terhadap kelompok yang berbeda.”⁸⁴ Juga “karena minimnya dukungan,”⁸⁵ ia melanjutkan, “kendala pendanaan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kelancaran program.”⁸⁶

⁷⁸ Tim Humas, Ditjen Bimas Budha Kementerian Agama RI (2022).

⁷⁹ Tim Redaksi, Kementerian Komunikasi & Informatika RI (2019)

⁸⁰ Humas Kemenag Tala, Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Laut (2023)

⁸¹ Ratna Lagonda (Ketua Majelis Klasis Poso Kota & Pendiri Komunitas Samba'a Raya), Wawancara oleh Penulis, Kantor GKST Klasis Poso Kota, Kel. Kasintuwu, Poso, 6 Desember 2023.

⁸² Lagonda, Wawancara.

⁸³ Lagonda, Wawancara.

⁸⁴ Lagonda, Wawancara.

⁸⁵ Lagonda, Wawancara.

⁸⁶ Lagonda, Wawancara.

Di sisi lain, meskipun dihadapkan pada tantangan yang signifikan, Ratna Lagonda menyampaikan harapannya terkait program Moderasi Beragama ini. Pertama, ia berharap agar Pemerintah Daerah Poso memberikan dukungan yang lebih besar pada komunitas mereka dalam menjalankan program, untuk memperkuat kerukunan antaragama di wilayah Poso Kota Bersaudara. "Saya harap PEMDA dapat lebih mendukung kami dalam menjalankan program-program moderasi beragama ini."⁸⁷

Pada akhir wawancara ini Lagonda mengutarakan beberapa harapannya, saya harap dapat terjadi perubahan sikap dari para pemimpin gereja yang masih pesimis, menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama antaragama. Selain itu, juga saya mengharapkan pendekatan edukatif yang dapat membuka pemahaman dan keterbukaan masyarakat serta jemaat gereja terhadap kelompok yang berbeda, khususnya umat Muslim. Terakhir adalah, adanya dukungan pendanaan yang lebih besar, baik dari internal gereja maupun eksternal, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan mencapai tujuan yang diinginkan.⁸⁸

Dengan komitmen yang kuat dan harapan yang terangkum dalam wawancara ini, Gereja GKST Klasis Poso Kota berusaha memberikan kontribusi positif dalam membangun kerukunan antaragama dan menciptakan lingkungan yang harmonis di wilayahnya. Melalui program Moderasi Beragama, gereja menunjukkan peran proaktifnya dalam pembangunan sosial dan merawat kerukunan di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Rehabilitasi (Psikologi & Spiritual)

Trauma psikologi yang tersisa pascakonflik memang tidak mungkin terhindarkan, sayangnya hal ini paling sering terabaikan,⁸⁹ terutama terhadap warga sipil. Dalam *Jurnal Social Science & Medicine* (2013), para peneliti mengatakan,

Dalam tiga dekade terakhir, konflik bersenjata semakin sering terjadi di antara penduduk sipil, yang mengakibatkan korban fisik dan mental yang lebih besar. Tentara yang kembali dari pertempuran dengan trauma psikologis sekarang menerima perhatian medis dan kebijakan untuk reintegrasi ke dalam angkatan kerja. Namun, hanya ada sedikit perhatian pada dampak dan pilihan yang tersedia bagi warga sipil yang mungkin menghadapi masalah serupa dalam mencapai keberhasilan angkatan kerja setelah terpapar trauma terkait perang.⁹⁰

⁸⁷ Lagonda, Wawancara.

⁸⁸ Lagonda, Wawancara.

⁸⁹ Lih. Asnath Niwa Natar, "Trauma Healing bagi Perempuan Korban Konflik: Belajar dari Konflik Maluku dan Poso." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 4, No. 1 (2019):1-21.

⁹⁰ Elizabeth A.M. Searing, Fernando Rios-Avila, Jesse D. Lecy, "The impact of psychological trauma on wages in post-conflict Bosnia and Herzegovina," *Social Science & Medicine*, vol. 96 (2013):165. [terj. Langsung]

Terkait kebutuhan di atas, melalui observasi, ditemukan bahwa pada tahun 2018, gereja GKI Sul-Sel Jemaat Poso meluncurkan Program Pelayanan Pemulihan Luka-luka Batin sebagai inisiatif untuk memberikan dukungan rohani kepada pemuda dan remaja yang mengalami trauma di masa lalu.

Program Alkitabiah ini, bertujuan untuk menjadi suatu bentuk bimbingan rohani bagi peserta yang memerlukan pemulihan dalam diri mereka. Dalam pelaksanaannya, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, dengan sekitar dua puluh orang peserta yang berpartisipasi pada kegiatan ini secara aktif. Meskipun program ini awalnya direncanakan untuk dilaksanakan secara periodik, peristiwa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memaksa program yang dilaksanakan secara kelompok ini harus dihentikan, dan hanya dilakukan secara insidental dan personal sesuai kebutuhan. Kendati mengalami jeda, harapan gereja adalah agar program ini dapat terus dilanjutkan.

Dengan fokus pada pemulihan secara rohani dan berbasis pada nilai-nilai Alkitab, Program Pelayanan Pemulihan Luka-luka Batin dari GKI Sul-Sel Jemaat Poso bukan hanya mencerminkan perhatian gereja terhadap kondisi psikologis anggota jemaatnya, tetapi juga menjadi bukti konkrit peran gereja dalam pembangunan sosial dengan memberikan dukungan dan bimbingan bagi individu yang memerlukan pemulihan dan pembinaan.⁹¹ Program Pelayanan Pemulihan Luka-luka Batin dari GKI Sul-Sel Jemaat Poso mencerminkan perhatian gereja terhadap kondisi psikologis anggota jemaatnya. Lebih dari sekadar memberikan dukungan rohani, program ini menjadi bukti konkrit peran gereja dalam misi pembangunan sosial. Gereja memberikan dukungan dan bimbingan bagi individu yang memerlukan pemulihan dan pembinaan, menjadi agen positif dalam membantu masyarakat mengatasi dampak traumatis konflik.

Ini menunjukkan bahwa Program Pelayanan Pemulihan Luka-luka Bathin menjadi langkah konkrit gereja GKI Sul-Sel Jemaat Poso dalam mencapai misi pembangunan sosial pascakonflik di Poso Kota Bersaudara. Meskipun menghadapi tantangan, antusiasme peserta dan komitmen gereja menggambarkan bahwa program ini memberikan dampak positif dan layak untuk diteruskan. Implikasinya adalah perlunya dukungan berkelanjutan, baik dari internal gereja maupun pihak eksternal, untuk menjaga dan mengembangkan program ini guna mendukung pemulihan dan pembangunan sosial di komunitas yang terpengaruh konflik.

⁹¹ Gereja GKI Poso, "Laporan Pelayanan Gereja GKI Poso" (Poso: GKI Poso, 2018).

Rekonstruksi

Selain korban tewas & terluka, pada 5 Desember 2001, Pemerintah juga mempublikasikan data bahwa ada “7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak.”⁹² Dalam konteks inilah Gereja juga telah mengambil peran, yakni terlibat dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi fisik yang diperlukan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat Poso Kota Bersaudara pasca konflik. Ande Walkamdi, seorang anggota majelis di Gereja GKST Baithel Sayo, Poso, menceritakan pengalamannya pada tahun 2001, ia mengatakan, bahwa:

setelah kerusakan banyak orang, terutama Kristen, termasuk kami sekeluarga, kehilangan rumah karena pembakaran oleh pihak sebelah. Nah, saat itu ada informasi bahwa ada bantuan perumahan dari Sinode Gereja GPdI. Setelah saya mencari informasi, ternyata benar, dan singkat cerita keluarga kami serta beberapa keluarga di kompleks ini mendapat bantuan tersebut, bahkan badan rumah ini, sebagian besar masih bantuan itu.⁹³

Walkamdi juga menegaskan bahwa “tidak ada gereja lain yang melaksanakan program begitu di sini.”⁹⁴ Informasi ini menggarisbawahi peran khusus Sinode Gereja GPdI dalam memberikan bantuan yang nyata kepada masyarakat yang terkena dampak kerusakan.

Bantuan ini merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan mendesak dan pemulihan bagi umat Kristiani yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik tersebut. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian Gereja terhadap kondisi para anggota jemaatnya yang terdampak konflik, tetapi juga menyoroti keunikan dan ketidakberlanjutan program serupa dari gereja-gereja lain di wilayah tersebut. Dengan demikian, peran gereja, dalam hal ini Sinode Gereja GPdI, dalam memberikan bantuan rumah kepada korban kerusakan pada tahun 2001 tidak hanya menjadi bukti konkrit dari perhatian sosial gereja terhadap masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dalam membangun dan membantu komunitas yang terkena dampak konflik di wilayah Poso Kota Bersaudara.

Analisis ini menunjukkan bahwa peran gereja dalam pemulihan fisik pasca-konflik di Poso Kota Bersaudara memiliki dampak positif. Hal ini menjadi unik, mengingat di tempat lain peran ini diambil oleh pemerintah, sebagai contoh di Provinsi Maluku, 2021

⁹² Sinansari Ecip & Darwis Waru. *Kerusuhan Poso yang Sebenarnya*. (Jakarta: Global Mahardika Netama, 2001).

⁹³ Ande Walkamdi (Majelis GKST Baithel Sayo), Wawancara oleh Penulis, Kel. Sayo, 5 Desember 2023.

⁹⁴ Walkamdi, Wawancara.

yang lalu.⁹⁵ Peran Sinode Gereja GPDI menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar gereja dalam upaya pembangunan sosial, khususnya di tengah tantangan pasca-konflik. Melalui koordinasi efektif, gereja-gereja dapat bekerja bersama untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Implikasi yang muncul menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan program pemulihan fisik dan mendukung sinergi antara gereja dan komunitas untuk mencapai pembangunan sosial holistik. Kolaborasi ini tidak hanya menitikberatkan pada langkah-langkah jangka pendek, tetapi juga mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam kerangka kerja yang lebih luas untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Kolaborasi antara gereja dan komunitas menjadi krusial dalam menyelaraskan sumber daya dan pengetahuan, membentuk pendekatan yang komprehensif terhadap pembangunan sosial, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap perubahan positif jangka panjang.

Ekonomi

Selain yang dikerjakan oleh Persekutuan Oikoumene sebagaimana yang diungkapkan Usman di atas,⁹⁶ dorongan Gereja dalam pertumbuhan Ekonomi juga ditemukan di Gereja Toraja Rehobot Poso. Hal ini dilaporkan dalam Jurnal Mosintuwu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, edisi April 2022, yang berjudul "Pelatihan Kewirausahaan Kaum Muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rehobot Poso." Dalam tulisan tersebut Tabita R. Matana dan Ita Mowidu, melaporkan bahwa anggota kaum muda gereja Toraja di jemaat Rehobot Poso yang mengikuti kegiatan ini berjumlah Tiga Puluh Delapan (38) orang, yang terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa.⁹⁷

Kegiatan ini menunjukkan Hasil dan Dampak secara Positif. Sebanyak 90% peserta mengakui ketidakpahaman mereka tentang wirausaha sebelum pelatihan. Hasil pelatihan mencakup pemahaman yang lebih baik tentang konsep wirausaha, motivasi peserta untuk terlibat dalam wirausaha meskipun dihadapkan pada risiko dan kebutuhan modal besar, serta penguatan bagi anggota pemuda yang telah memulai usaha

⁹⁵ Ruzady Adjis, "Distribusi Bantuan, Pos Keamanan dan Identifikasi Rumah Terbakar Jadi Fokus Penanganan Pasca Konflik Ori Kariuw," *Terasmaluku.com*, www.terasmaluku.com, diakses pada 17 Januari 2024. <https://terasmaluku.com/headline/2022/01/27/distribusi-bantuan-pos-keamanan-dan-identifikasi-rumah-terbakar-jadi-fokus-penanganan-pasca-konflik-ori-kariuw/>

⁹⁶ Usman, Wawancara.

⁹⁷ Tabita, "Pelatihan Kewirausahaan Kaum Muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rehobot Poso," *Jurnal Mosintuwu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, no. 1 (2022):21-23.

mereka, khususnya di bidang barbershop.⁹⁸ Implikasi positif Gereja dalam pembangunan sosial ekonomi juga nampak dalam kerjasama ini. Melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan ini, gereja tidak hanya memberikan pemahaman konseptual kepada kaum muda tentang wirausaha, tetapi juga memotivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Dukungan konkret bagi anggota pemuda yang telah memulai usaha mereka sendiri menciptakan dampak positif dalam pembangunan sosial ekonomi di komunitas gereja Toraja di jemaat Rehobot Poso.

Analisis ini menunjukkan bahwa gereja, dalam hal ini Gereja Toraja Rehobot Poso, memiliki peran yang positif dalam membantu pemulihan ekonomi pascakonflik. Pelatihan kewirausahaan adalah salah satu inisiatif yang berhasil memberikan pemahaman, motivasi, dan dukungan konkret kepada kaum muda, menciptakan dampak positif yang dapat berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi di Poso Kota Bersaudara. Rekomendasi berfokus pada keberlanjutan program serupa dan koordinasi antara gereja dan pemerintah serta pihak lain untuk mencapai hasil yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam merangkum peran Gereja dalam dimensi pelayanan multidimensi, pendidikan, ekumenis, hubungan antarumat, rehabilitasi (psikologi dan spiritual), rekonstruksi, dan ekonomi di Poso Kota Bersaudara, dapat disimpulkan bahwa Gereja telah memainkan peran yang substansial dalam mempromosikan ketentraman, kerukunan, dan pembangunan masyarakat pascakonflik. Meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan, dedikasi dan komitmen Gereja dalam membina nilai-nilai spiritual, mendukung pendidikan, memfasilitasi rekonsiliasi, serta memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi dan psikologis, mencerminkan peranannya sebagai agen kunci dalam membentuk fondasi pembangunan sosial yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Implikasi Bagi Gereja, Pemerintah dan Lembaga Terkait, serta Penelitian Selanjutnya

Bagi Gereja Kristen

Hasil penelitian ini membawa implikasi signifikan bagi peran dan tanggung jawab Gereja Kristen dalam konteks pembangunan sosial di Poso Kota Bersaudara pasca konflik: (1) Perluasan dan Penyesuaian Program: Gereja Kristen dapat

⁹⁸ Tabita, "Pelatihan Kewirausahaan Kaum Muda Persekutuan Pemuda.

mempertimbangkan perluasan dan penyesuaian program-programnya untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak konflik. Peningkatan pada program rehabilitasi, dukungan psikologis, dan pemberdayaan masyarakat bisa menjadi langkah-langkah yang relevan. (2) Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Gereja perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah, untuk mendukung dan memperkuat inisiatif pembangunan sosialnya. Kolaborasi ini dapat mencakup dukungan keuangan, bantuan logistik, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. (3) Penguatan Kapasitas: Gereja perlu memperkuat kapasitas internalnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun manajemen, guna meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan sosialnya.

Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung upaya pembangunan sosial yang dilakukan oleh Gereja Kristen di Poso Kota Bersaudara: (1) Pemberian Dukungan Kelembagaan: Pemerintah perlu memberikan dukungan kelembagaan yang lebih besar kepada gereja dan lembaga sosial lainnya yang terlibat dalam pembangunan sosial. Pembentukan kebijakan dan alokasi anggaran khusus dapat mendorong keberlanjutan dan perluasan program. (2) Kolaborasi dan Konsultasi: Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya melakukan kolaborasi yang erat dan konsultasi dengan gereja serta lembaga non-pemerintah lainnya dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan sosial, untuk memastikan adanya sinergi dan efektivitas. (3) Penyediaan Sumber Daya: Pemerintah dapat memberikan bantuan dan fasilitas dalam bentuk sumber daya, termasuk dukungan teknis, pelatihan, dan alokasi anggaran yang memadai.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran Gereja Kristen dalam pembangunan sosial pasca-konflik di Poso Kota Bersaudara, yaitu (1) Studi Dampak Jangka Panjang: Penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan pada studi dampak jangka panjang dari program-program Gereja Kristen, untuk memahami perubahan dan keberlanjutan yang terjadi dalam masyarakat. (2) Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan dan Tantangan: Studi mendalam mengenai faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dalam implementasi

program Gereja Kristen dapat memberikan wawasan lebih lanjut bagi pemahaman dan perbaikan di masa mendatang. (3) Pengembangan Model Kolaboratif: Penelitian selanjutnya dapat merumuskan model kolaboratif antara Gereja Kristen, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah lainnya untuk membangun kerangka kerja yang efektif dalam pembangunan sosial.

Dengan melibatkan Gereja Kristen secara lebih proaktif, menerapkan dukungan kebijakan yang lebih baik, dan mendalami pemahaman melalui penelitian yang lebih komprehensif, dapat diharapkan pembangunan sosial di Poso Kota Bersaudara menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Setelah Seperempat abad pasca konflik komunal di wilayah Poso, yang telah mengguncang struktur sosial, pendidikan, spiritual, psikologi dan ekonomi Masyarakat, Gereja telah berperan aktif di dalamnya. Meski tidak banyak terpublikasi, dampak positif dalam memperkuat hubungan antar gereja, antar umat beragama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hingga memberikan dukungan bagi individu dan komunitas secara spiritual, selama ini telah diupayakan. Dalam menarik kesimpulan dari penelitian mengenai evaluasi kesuksesan atau tantangan yang dihadapi Gereja dalam mencapai misi pembangunan sosial di Poso setelah 25 tahun pasca konflik, perlu diperhatikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Gereja-gereja di Poso Kota Bersaudara cenderung masih bersifat lokal dan denominasional.

Meskipun Gereja telah berkontribusi secara multidimensi untuk mendukung pembangunan sosial di wilayah ini, namun perlu diakui bahwa pengaruhnya masih terbatas pada tingkat lokal dan denominasional. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar-gereja serta mengembangkan strategi yang lebih inklusif untuk mencapai dampak yang lebih luas di masyarakat Poso. Juga, tantangan yang muncul dalam upaya ini mencakup perlunya penyatuan persepsi di antara Orang Percaya, baik pemimpin gereja maupun jemaat, terkait konsep "moderasi beragama". Kesamaan pandangan ini dianggap penting sebagai landasan bersama untuk mencapai tujuan pembangunan sosial secara holistik. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa peningkatan komunikasi dan dialog antar anggota gereja serta pemangku

kepentingan lainnya perlu terus diupayakan agar tercipta pemahaman yang sama terkait nilai-nilai moderasi beragama ini.

Keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memberikan panduan bagi Gereja dan pihak terkait yang menghadapi tantangan serupa di lingkungan pasca konflik. Informasi dan temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung misi pembangunan sosial di Poso dan mungkin juga di konteks konflik lainnya.

REFERENSI

- Aditjondro, George Junus. "Kerusuhan Poso Dan Morowali, Akar Permasalahan Dan Jalan Keluarnya." *Academia*, 2004. ProPatria, Hotel Santika, Jakarta, January 7, 2004. https://www.academia.edu/29706102/kerusuhan_poso_dan_morowali_akar_permasalahan_dan_jalan_keluarnya.
- Adjis, Ruzady. "Distribusi Bantuan Pos Keamanan dan Identifikasi Rumah Terbakar Jadi Fokus Penangan Pasca Konflik Ori Kariuw." *Terasmaluku.com*. Januari 27, 2022. <https://terasmaluku.com/headline/2022/01/27/distribusi-bantuan-pos-keamanan-dan-identifikasi-rumah-terbakar-jadi-fokus-penanganan-pasca-konflik-ori-kariuw>.
- Alganih, Igneus. "KONFLIK POSO (Kajian Historis Tahun 1998-2001)." *S1 thesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014.
- Atmanto, Nugroho Eko. "Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama Pada Sekolah Menengah Atas Di Daerah Pasca Konflik (Studi Di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang & SMA Shalom Bengkayang)." *Jurnal Smart (Studi Masyarakat Religi Dan Tradisi)*, 3, no. 2 (2017):155-168. <https://doi.org/10.18784/smart.v3i2.513>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso. *Kabupaten Poso Dalam Angka 2014*. 2015. <https://posokab.bps.go.id/id/publication/2015/01/12/5e4d6a975f235ea9b9d10665/kabupaten-poso-dalam-angka-2014.html>.
- Butarbutar, Imelda, Dyoys Rantung, & Lamhot Naibaho. "Pendidikan Perdamaian Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen Sebagai Upaya Meminimalisasi Konflik Dan Kekerasan Antar Mahasiswa Di Univeristas Hkbp Nommensen Medan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 6962-6972.

- Ecip, Sinansari & Darwis Waru. *Kerusuhan Poso yang Sebenarnya*. Jakarta: Global Mahardika Netama, 2001.
- Tari, Ezra & Jeni Isak Lele. "Gereja Dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini." *Jurnal Teruna Bhakti*, 3, no. 1 (2020): 25-35.
- Fresh Essays. "The Roles Churches Play in Social Welfare and Society." *Freshessays*. March, 2023. <https://samples.freshessays.com/the-roles-churches-play-in-social-welfare-and-society.html>.
- Gereja Kristen Indonesia Poso. *Laporan Pelayanan Gereja GKI Poso*. Poso: GKI Poso, 2018.
- Hadi, Brown Tajima. "Kabupaten Poso." *Wikipedia*, 2005. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Poso#CITEREFBrownTajimaHadi2005.
- Hesegem, Samuel M. "Sikap GKI TP Klasis Balim Yalimo kepada Jemaat Beithel Polimo Kurima tentang Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Khusus." *Tesis*. Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/10517>.
- Humas, Tim. *Ditjen Bimas Budha Kementerian Agama RI*. October 17, 2022. <https://bimasbuddha.kemenag.go.id/supriyadi-pencanangan-tahun-toleransi-mewujudkan-kehidupan-beragama-yang-moderat-berita-901.html>.
- Intiyaaz, Faqih. "Pdt. Arnold Tobondo Kenang Perjuangan JK Damaikan Poso." *tribun timur.com*. May 15, 2023. <https://makassar.tribunnews.com/2023/05/15/pdt-arnold-tobondo-kenang-perjuangan-jk-damaikan-poso-2001-dia-ditakdirkan-tuhan-selamatkan-bangsa>.
- Kalembiro, Risaldy. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah)*. *Tesis Magister*. Universitas Brawijaya, Malang, 2018.
- Kementerian Agama Poso. *Arsip Data Gereja Kabupaten Poso*. Kementerian Agama Kabupaten Poso, 2023.
- Kristen, Tim Mimbar. "Peranan Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. October 31, 2021. <https://kemenag.go.id/kristen/peranan-gereja-dalam-mewujudkan-keadilan-sosial-3f37jd>.

- Lagonda, Ratna. *Merawat Kerukunan & Merajut Kebersamaan*. Interview By Pieter G.O. Sunkudon, Desember 6, 2023.
- Larat, Innocentius. "Peran Gereja Katolik Dalam Memperjuangkan Kemanusiaan Atas Konflik Di Maluku." *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual*, 8, no. 1 (2023): 48-62. <https://doi.org/10.47025/fer.v8i1.110>.
- Laukapitang, Yunus D. A. "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Jaffray*, 14, no. 2 (2016): 241-268. <https://dx.doi.org/10.25278/jj71.v14i2.212>.
- Lederach, John Paul. *Building Peace: Sustainable Reconciliation In Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1997.
- Buchanan, Cate (ed.). *Pengelolaan Konflik Di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik Di Maluku, Papua Dan Poso*. Lausanne: Centre For Humanitarian Dialogue, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia And The Centre For Humanitarian Dialogue, 2011.
- Lukito, Daniel Lucas "Kecenderungan Gerakan Oikumene Dewasa Ini." *Jurnal Pelita Zaman*, 6, no. 1 (1991): 63-72.
- Laha, M. Saleh, Fatmawada Sudarman, & Moh. Nutfa. "Kehidupan Pasca Konflik Dan Ketegangan Relasi Sosial: Suatu Ancaman Kehancuran Social Capital Trust." *Jurnal Predestination: Jurnal Of Society And Culture*, 1, no. 2 (2021): 109-118. <https://doi.org/10.26858/prd.v1i2.18549>.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Tjetjep Rohendi Rohidi (ed.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009.
- Natar, Asnath Niwa. "Trauma Healing Bagi Perempuan Korban Konflik: Belajar Dari Konflik Maluku Dan Poso." *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4, no. 1 (2019): 1-21. <https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.205>.
- Panjili, Nurul Fitriani. "Modal Sosial Komunitas Dalam Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Di Daerah Pasca Konflik Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah." *Thesis*. IPDN, 2023. <http://eprints.ipdn.ac.id/13312>.
- Pello, S. Henderina A., Philipus Sunardi, & Junius Nayoan. "Peran Gereja Dalam Pembangunan Karakter Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Membangun Bangsa." *Prosiding Pelita Bangsa*, i, no. 2 (2021): 156-160. <http://dx.doi.org/10.30995/ppb.v1i2.515>.

- Redaksi Harian Mercusuar. "GKST Berperan Penting dalam Pembangunan Daerah." *Mercusuar*, September 13, 2023. <https://mercusuar.web.id/sulteng-membangun/gkst-berperan-penting-dalam-pembangunan-daerah>.
- Retnowati. "Agama, Konflik, Dan Integrasi Sosial." *Analisa*, 21, no. 1 (2014): 189-200. <http://dx.doi.org/10.18784/analisa.v21i02.14>.
- Sapan, Erwin Bunga. "Oikumene: Kehidupan Oikumene Gereja Toraja Dengan Gereja Pentakosta Di Indonesia Bagi Kehidupan Bermasyarakat Di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja." *Kamasean: Jurnal Teologi Kristen*, 2, no.1 (2021): 59-75. <http://dx.doi.org/10.34307/kamasean.v2i1.42>.
- Searing, Elizabeth A.M., Fernando Rios-Avila, & Jesse D. Lecy. "The Impact of Psychological Trauma on Wages In Post-Conflict Bosnia And Herzegovina." *Social Science & Medicine*, 96 (2013): 165-173. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.020>.
- Setiawan, Agus. "Ketahui Bagaimana Sejarah Terjadinya Perang Poso (1998-2001)." *mnasprok*, February 20, 2023. <https://munasprok.or.id/Ketahui-Bagaimana-Sejarah-Terjadinya-Perang-Poso-1998-2001>.
- Setyono, Ernita Krisandi Budi & Tri Cahyo Utomo. "Resolusi Konflik Komunal Di Maluku Pasca Reformasi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 no. 2 (2013): 96-101. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2154>.
- Sigit. "Kemenag Terus Prioritaskan Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama." *Kementerian Agama RI*, February 20, 2019. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-terus-prioritaskan-program-pengarusutamaan-moderasi-beragama-0hxo7i>.
- Syafiie, Zulkifli Hi Manna & Inu Kencana. "Strategi Pemerintah Daerah Poso Dalam Menghadapi Konflik Sosial." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 1, no. 2 (2014): 225-256. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v1i2.2099>.
- Matana, Tabita R. & Ita Mowidu. "Pelatihan Kewirausahaan Kaum Muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rehobot Poso." *Mosintuwu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no. 1 (2022): 21-23. <http://dx.doi.org/10.71127/2808-9073.464>.
- Tala, Humas Kemenag. "Ketua FKUB: Moderasi Beragama Perkuat Kerukunan Umat Beragama." *Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Laut*. July 4, 2023.

- <https://tanahlaut.kemenag.go.id/read/850/ketua-fkub-moderasi-beragama-perkuat-kerukunan-umat-beragama>.
- Le, Thai-Ha, Man-Thien Bui, & Gazi Salah Uddin. "Economic And Social Impacts Of Conflict: A Cross-Country Analysis." *Economic Modelling*, 115, (2022): 1-13.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105980>.
- Tim Redaksi. "Gereja Kristen Dan Kontribusinya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan." *Wahana Visi*, November 25, 2022. <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/gereja-kristen-dan-kontribusinya-dalam-mewujudkan-kesejahteraan>.
- Tontji, Soumokil. "Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku." Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2011.
<https://repository.uksw.edu//handle/123456789/734>.
- Tuhuteru, Laros. "Pengaruh Situasi Pasca Konflik Sosial Terhadap Pembelajaran PKn Di Sekolah." *Jurnal Pekan* 6, no. 1 (2021): 50-65.
<https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1167>.
- Tzifakis, Nikolaos. "Postconflict Economic Reconstruction," in *Encyclopedia Princetoniensis*, Princeton University, 2024.
<https://pesd.princeton.edu/node/586>.
- Ulum, Raudatul. "Prospek Pembangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas." *Jurnal Analisa*, 20, no. 1 (2013): 25-35. <http://dx.doi.org/10.18784/analisa.v20i1.3>.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012. "Penanganan Konflik Sosial." Kementerian Keuangan, 2012. [kemenkeu.go.id](https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2012/7TAHUN2012UU.PDF). 2012. <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2012/7TAHUN2012UU.PDF>.
- Usman, Atriadi. *Persekutuan Oikoumene Gereja-Gereja Se-Kelurahan Ranononcu*, Interview By Pieter G.O. Sunkudon. Desember 9, 2023.
- Walkamdi, Ande. *Bantuan Perumahan Sinode GPdI, Kel. Sayo*. Interview By Pieter G.O. Sunkudon. 10 Desember, 2023.
- Widayat, Ilovia Aya Regita, Diana Mutiara Bahari, Azka Azzahra Salsabila, Nabila Rizky Sri Handayani, & anna Khairunnisa Adjie. "Konflik Poso : Sejarah Dan Upaya Penyelesaiannya." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13, no.1 (2021): 1-9.
<https://doi.org/10.24114/jupiiis.v13i1.18618>.
- Wietse A. Tol, Ria Reis, Dessy Susanty, And Joop Tvm De Jong. "Communal Violence and Child Psychosocial Well-Being: Qualitative Findings from Poso, Indonesia."

Transcultural Psychiatry 47, no. 1 (2010): 112-135.

<https://doi.org/10.1177/1363461510364573>.

Wijaya, Nanang. "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso."

Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1, no. 1 (2020): 58-63.

<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27048>.

Williams, Willa. *Biola University Center For Marriage And Relationships*. Biola University,

La Mirada, California, July 18, 2017. <https://cmr.biola.edu/blog/2017/jul/18/5-reasons-to-communicate-and-resolve-conflict-from-a-spiritual-perspective>.

Yakobus, I Ketut, Rinto Z.W. Abidjulu, Yuyun Alfasius Tobondo, & Feliks Arfid Guampe.

"Analisis Penanganan Teroris Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (Mit) Pasca Konflik Di Kabupaten Poso." *Jurnal Sosialisasi*, 10, no. 1 (2023): 79-91.

<https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i1.43252>.

Yin, Jieli, Meng Qu, Ganli Liao, Muxiao Jia, & Miaomiao Li. "Exploring the Relationships Between Team Leader's Conflict Management Styles and Team Passion: From the Emotional Perspective." *Frontier Psychology*, 13 (2022): 1-13.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.921300>.